

KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA MISRIN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA¹

*Faturochman
Marcelinus Molo²*

Abstract

The proximate of poverty level is based on expenditure per individual member of a household. The low expenditures are primarily found among households engaged in labouring activities or in agricultural sector. The consequences of a low expenditure or income is the inability of the household in providing appropriate needs for its members, including access to informations and schooling.

An enhancement of human resources development and promotion of equal access to the remunerative activities are among alternatives of raising the low income households.

Pendahuluan

Sejauh ini Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai wilayah yang memiliki indeks kesejahteraan yang tinggi. Hasil perhitungan Biro Pusat Statistik (1993) menempatkan DIY pada posisi kedua setelah DKI Jakarta. Bagi sebagian orang, data ini cukup unik karena DIY selama ini memiliki potensi wilayah yang tidak begitu baik. Keunikan itu kemudian ditemukan jawabnya yang antara lain pada sumber daya manusia yang baik. Sumber daya manusia yang baik ini antara lain ditandai oleh kualitas penduduk yang tinggi seperti angka harapan hidup yang tinggi, fertilitas yang rendah, tingkat partisipasi kerja yang tinggi, dan pendidikan yang tinggi pula.

Kenyataan di atas bukan berarti bahwa di DIY tidak ada masalah sosial, ekonomi, dan kependudukan. Pada awal tahun tujuh puluhan, misalnya, masalah kemiskinan pertama kali mencuat dari hasil penelitian di wilayah ini (Singarimbun dan Penny, 1976). Hingga kini masalah kemiskinan ini juga masih merupakan masalah yang muncul di DIY. Hal ini terbukti dari hasil pemetaan desa tertinggal yang juga mencakup beberapa desa di wilayah DIY.

Apabila desa tertinggal atau desa miskin di DIY telah diidentifikasi secara aktual, tidak demikian halnya dengan penduduk atau rumah tangga miskin. Seperti sudah diketahui bahwa wilayah

- 1 Penulis mengucapkan terima kasih kepada Biro Pusat Statistik Jakarta yang telah memberi kesempatan untuk mengolah Data Susenas 1992.
- 2 Drs. Faturochman, MA. adalah staf peneliti Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada dan staf pengajar Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Marcelinus Molo, Ph.D. adalah staf peneliti Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan staf pengajar Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

miskin dan penduduk (orang) miskin memiliki perbedaan definisi yang jelas. Pada wilayah yang miskin belum tentu banyak penduduk miskin, sementara itu wilayah yang memiliki penduduk miskin cukup banyak juga belum tentu tergolong wilayah miskin.

Aktualisasi data penduduk miskin inilah yang pertama-tama mendorong penulis untuk mengkaji kemiskinan di DIY. Di samping itu, ada hal lain yang mendorong untuk mengkaji kemiskinan penduduk, yaitu mencari jalan untuk mengentaskan kelompok miskin tersebut. Sejauh ini usaha untuk itu sudah cukup banyak, namun hasilnya masih belum memuaskan. Ada beberapa hal yang menyebabkan kurang berhasilnya usaha-usaha itu. Salah satu di antaranya adalah kurang tepatnya mengidentifikasi kemiskinan dalam arti menelaah berbagai hal yang berkait dengan kemiskinan. Tanpa ada data yang akurat yang berkaitan dengan kemiskinan itu maka akan sulit untuk mengusabakan pengentasan kemiskinan secara baik.

Penduduk miskin biasanya dikaji dalam unit rumah tangga, bukan dalam unit individu. Dalam tulisan ini kemiskinan juga dianalisis dalam unit rumah tangga. Ada beberapa alasan untuk menganalisis rumah tangga miskin daripada penduduk atau individu miskin. Pertama, kemiskinan pada hakikatnya merupakan cermin keadaan ekonomi rumah tangga. Kedua, apabila ditemukan data-data rumah tangga miskin maka intervensi terhadap rumah tangga akan lebih efektif dibanding intervensi kemiskinan terhadap individu yang cenderung mengarah pada pandangan bahwa orang miskin memiliki karakteristik sebagai penyebab

kemiskinannya. Ketiga, data-data tentang rumah tangga miskin lebih mudah untuk dikembangkan daripada data-data individu miskin.

Kerangka Pemikiran

Meskipun kemiskinan merupakan atribut bagi individu-individu yang bersangkutan, pada kenyataannya keadaan tersebut terkait erat dengan kondisi rumah tangga. Kelompok-kelompok yang belum bisa atau tidak bisa mandiri (*dependant*) seperti anak-anak dan orang lanjut usia tentu tidak bisa langsung dikelompokkan dalam kategori miskin. Pengelompokan seseorang ke dalam suatu kategori tingkat kemiskinan sangat tergantung pada individu lain dalam rumah tangganya, bila memang ada. Oleh karena itu, kemiskinan penduduk bisa juga dikelompokkan menjadi penduduk atau individu miskin dan rumah tangga miskin (BPS, 1991). Maka dari itu, ada keterkaitan erat di antara kemiskinan rumah tangga dengan kemiskinan individu, jika informasi mengenai ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran di antara anggota dalam rumah tangga tertentu tidak tersedia. Keterkaitan dapat dilihat dari rata-rata pendapatan atau pengeluaran untuk tiap individu dalam rumah tangga. Kemampuan rumah tangga itu sendiri tidak terlepas dari perbandingan jumlah anggota rumah tangga yang menjadi beban (*dependants*) dan penyumbang pendapatan (*earners*).

Tulisan ini tidak akan memperdebatkan definisi dan penentuan garis kemiskinan yang sudah ada. Ukuran umum untuk Indonesia antara lain diajukan Sajogyo (1977), Biro Pusat Statistik (1987: 20), dan World Bank

(1990: 163). Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemampuan yang dimaksudkan di sini bukan hanya kemampuan individu itu sendiri, tetapi juga dalam konteks rumah tangganya seperti dijelaskan di atas. Definisi ini berbeda dengan pengertian *kemiskinan wilayah* (lihat Hadiwigeno dan Pakpahan, 1993) seperti yang digunakan oleh Bappenas dalam rangka proyek Inpres Desa Tertinggal (IDT). Kemiskinan individu mengacu pada ketidakmampuan individu tersebut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup yang pokok, sedangkan kemiskinan (ketertinggalan) wilayah ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur bagi penduduk di wilayah bersangkutan.

Garis kemiskinan yang banyak dikutip untuk menentukan jumlah penduduk miskin dan yang tidak miskin diajukan oleh Sajogyo (1977). Pada awalnya garis kemiskinan itu adalah setara dengan harga 240 kilogram beras per orang per tahun untuk pedesaan dan 360 kilogram per orang per tahun untuk perkotaan. Perkembangan selanjutnya ketentuan garis kemiskinan pun berubah menjadi lebih rinci lagi yaitu di bawah 240, 240-320, 320-480, dan lebih dari 480 kilogram ekuivalen beras. Klasifikasi ini tampaknya mampu mengelompokkan penduduk secara lebih rinci. Kelompok paling bawah disebut sangat miskin, selanjutnya miskin, hampir berkecukupan, dan kecukupan.

Setelah didapatkan cara untuk menentukan penduduk miskin dan tidak miskin, dua pertanyaan berikutnya sangat penting untuk dijawab. Pertama, berapa banyak penduduk miskin?

Kedua, siapa atau apa karakteristik penduduk dan rumah tangga miskin tersebut? Kedua permasalahan ini saling terkait erat satu dengan lainnya. Dalam pembahasan berikut ini keduanya dikemukakan tidak terpisah.

Penduduk dan rumah tangga miskin, terutama di di pedesaan, tidak bisa lepas dari keadaan wilayah setempat. Ada wilayah-wilayah tertentu di pedesaan memiliki potensi kurang baik sehingga sulit dikembangkan dan penduduk yang ada di sana juga dapat memenuhi kebutuhan hidup berdasarkan sumber daya wilayah tersebut saja. Kondisi seperti iklim, kesuburan tanah, topografi merupakan potensi dasar suatu wilayah, sedangkan sumber daya hayati bisa merupakan modal yang bisa dikembangkan. Keadaan ini akan menjadi lebih buruk lagi bila tidak ada pengembangan wilayah yang memadai (Hadiwigeno dan Pakpahan, 1993).

Di Jawa permasalahan kemiskinan memang spesifik. Penduduk berlebih menyebabkan wilayah yang potensial sekalipun akan sulit untuk dikembangkan agar memenuhi kebutuhan penduduk. Sebagai contoh, lahan yang terlalu sempit (lihat Gunawan dan Erwidodo, 1993; Sajogyo, 1977; 1993) merupakan salah satu faktor penting yang berkaitan dengan kemiskinan di pedesaan Jawa. Petani gurem yang mengusahakan kurang dari setengah hektar tanah merupakan mayoritas petani di Jawa.

Ada beberapa usaha yang mengarah pada perbaikan pendapatan petani. Intensifikasi pertanian merupakan program yang mendapat prioritas utama. Meskipun program ini secara umum dinilai sukses, kenyataannya belum bisa mengatasi masalah

rendahnya pendapatan penduduk di pedesaan. Kenyataannya masih menunjukkan bahwa sebagian penduduk dan rumah tangga miskin mengandalkan pertanian sebagai pekerjaan utama (Dillon dan Hermanto, 1993). Akan tetapi, usaha-usaha *nonfarm* dan *off-farm* tetap menjadi sumber pendapatan komplementer atau alternatif bagi keluarga.

Berbeda dengan rumah tangga miskin di desa, di perkotaan rumah tangga miskin lebih banyak yang mengandalkan penghasilan dari sektor jasa. Rendahnya kesempatan di sektor lain mengarahkan penduduk yang tidak memiliki modal dan kemampuan cukup terjun ke sektor jasa atau lebih dikenal dengan sektor informal. Mereka yang terjun ke sektor ini pada umumnya tidak bermaksud untuk tetap berkerja di sana, tetapi merupakan cara untuk *survive* sambil mengincar peluang yang lebih baik. Dengan demikian, apabila mereka tergolong kelompok miskin maka dapat dilihat sebagai suatu proses, bukan miskin sebagai akibat semata-mata.

Selain jumlah anggota rumah tangga besar, di dalam rumah tangga miskin ditemukan lebih banyak anggota yang kurang produktif bila dibandingkan dengan keluarga tidak miskin (Dillon dan Hermanto, 1993; Hadiwigeno dan Pakpahan, 1993; Suryana dan Pasandaran, 1993). Akan tetapi, ada pula pendapat lain yang menyatakan bahwa rumah tangga miskin tidak selalu memiliki anggota yang lebih banyak (lihat Sajogyo, 1986). Hal ini disebabkan mereka telah menerima *norma keluarga kecil, sejabtera, babagia*. Dengan kata lain rumah tangga miskin menerapkan norma tersebut agar tidak memiliki beban yang terlalu berat.

Kedua keadaan semacam ini menurut Dillon dan Hermanto (1993) merupakan fenomena kemiskinan sebagai suatu proses.

Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa kemiskinan merupakan suatu akibat. Dalam hal ini rumah tangga yang tadinya tidak miskin maupun yang miskin terbebani antara lain oleh jumlah anggota keluarga tidak produktif. Bila pendapatan rumah tangga tidak meningkat sejajar dengan beban itu maka rumah tangga itu akan menjadi miskin atau semakin miskin. Inilah salah satu penjelasan keterkaitan antara rumah tangga miskin dengan besarnya anggota rumah tangga tersebut. Apabila dalam siklus-hidup keluarga yang lebih lanjut semakin banyak anggota rumah tangga yang mencari nafkah, rumah tangga tersebut akan mentas dari kemiskinan yang dialami sebelumnya. Maka kemiskinan seperti ini bisa disebut kemiskinan situasional.

Hasil-hasil penelitian cenderung menunjukkan hubungan yang positif antara kemiskinan dengan jumlah anggota rumah tangga (Chemichovsky dan Meesook, 1984; World Bank, 1990: 33, 35). Tentu saja hal ini terjadi bila banyak anggota rumah tangga tidak produktif. Produktivitas yang rendah dapat berasosiasi, antara lain, dengan jam kerja yang rendah (setengah menganggur), terutama di kalangan penduduk usia muda, tingkat pendidikan rendah yang menyebabkan terjadi segmentasi pekerja pada pekerjaan berpenghasilan rendah juga.

Dilihat dari segi proses, jumlah *badita* dan yang masih bersekolah dalam suatu rumah tangga merupakan beban yang tidak ringan. Biaya untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sandang,

perawatan kesehatan dan pendidikan jelas tidak kecil. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila di wilayah dengan proporsi penduduk miskin tinggi *enrollment rate* relatif rendah. Bila penduduk usia muda tidak mendapatkan pendidikan memadai maka kemiskinan yang terjadi bukan saja sebagai proses, tetapi bisa berlanjut menjadi suatu akibat. Skenario seperti ini dimungkinkan terjadi di negara-negara yang tidak memberikan subsidi besar untuk pendidikan dan kesehatan.

Pengangguran dan setengah menganggur dianggap sebagai salah satu penyebab utama timbulnya kemiskinan absolut (Adler-Karlsson, 1981). Mereka yang tidak bekerja tentu tidak akan memperoleh pendapatan, sementara yang setengah menganggur akan memperoleh pendapatan yang rendah. Sejauh ini masalah pengangguran dan setengah pengangguran pada dasarnya disebabkan oleh salah satu dari dua penyebab atau keduanya. Penyebab pertama adalah sempitnya peluang kerja dan penyebab kedua adalah pertumbuhan angkatan kerja yang terlalu tinggi. Bila ditelusur lebih jauh, akan tampak bahwa kedua hal tersebut merupakan masalah makro yang berkaitan erat dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan. Secara umum bisa disebutkan bahwa strategi pembangunan yang padat modal akan mengabaikan segmen tertentu dari kegiatan ekonomi yang paling banyak digeluti oleh kelompok yang rentan terhadap kemiskinan seperti sektor pertanian di pedesaan dan jasa di kota.

Kemiskinan suatu rumah tangga dapat dikenal dengan mudah melalui kondisi di dalam rumah tangga tersebut. Di perkotaan, kemiskinan dapat dilihat

dari rumah penduduk di lingkungan yang buruk, sempit dan padat, dan konstruksi yang kurang memenuhi persyaratan baku. Di pedesaan, luas lantai rumah penduduk miskin mungkin tidak berbeda jauh dengan penduduk tidak miskin, namun konstruksi bangunannya akan berbeda secara mencolok. Hal itu bisa dilihat dari jenis lantai, dinding, dan atap rumah.

Di samping faktor perumahan, bisa juga dilihat dari berbagai faktor yang menunjang perumahan seperti penerangan dan air. Dilihat dari segi pengembangan wilayah, rumah tangga miskin tampaknya identik dengan wilayah miskin di mana ketersediaan fasilitas seperti penerangan dan air bersih kurang memadai. Wilayah-wilayah yang kurang potensial tidak akan mendapat prioritas utama dalam memperoleh fasilitas tersebut. Di lingkungan wilayah yang telah dikembangkan melalui berbagai program, hanya rumah tangga yang miskinlah yang tidak mampu memperoleh fasilitas penerangan listrik dan air bersih.

Pada akhirnya ketersediaan air bersih sangat mempengaruhi kesehatan penduduk. Penduduk yang miskin akan sulit mendapat air bersih dan keadaan ini mempengaruhi tingkat kesehatan. Gizi buruk juga berkaitan dengan kemiskinan. Pabinru dan Saliem (1993) menemukan bahwa kelompok rumah tangga strata rendah (miskin) mengalami defisit energi dan protein yang paling berat. Kaitan tersebut tampaknya berawal dari ketidakmampuan rumah tangga miskin untuk membeli makanan dan menyediakan biaya untuk pengobatan.

Uraian di atas masih terbatas pada penjelasan hubungan antara kemiskinan dengan berbagai hal yang terkait. Pada kenyataannya hubungan tersebut tidak semata-mata *bivariat* seperti diuraikan tadi. Sebagai kerangka untuk menganalisis karakteristik rumah tangga miskin, beberapa pemikiran di atas tampaknya cukup memadai, namun untuk menganalisis keterkaitan satu faktor dengan faktor lain secara keseluruhan dibutuhkan suatu sintesis lebih lanjut. Data-data yang akan dipaparkan berikut ini diharapkan bisa mengarahkan pada kesimpulan tentang keterkaitan-keterkaitan seperti yang dimaksud.

Metode

Data yang digunakan adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 1992. Data rumah tangga dalam survei diagregasikan untuk wilayah desa dan kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unit analisis.

Kemiskinan yang dianalisis dalam tulisan ini dihitung sebagai berikut. Dalam Susenas 1992 tersedia data tentang pengeluaran rumah tangga. Oleh karena itu, data pengeluaran ini akan digunakan sebagai proksi terhadap tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan diperoleh dengan membagi pengeluaran rumah tangga dengan harga beras resmi sebesar Rp 536,00 per kilogram pada tahun 1992. Berdasarkan harga beras, maka tingkat kemiskinan atau status ekonomi untuk pedesaan dibedakan atas tiga kelompok, yaitu:

1. miskin dengan pengeluaran kurang dari 320 kilogram beras per orang per tahun;

2. hampir cukup dengan pengeluaran antara 320-480 kilogram per orang per tahun; dan
3. tidak miskin dengan pengeluaran lebih dari 480 kilogram per orang per tahun.

Untuk perkotaan kategorisasinya adalah:

1. miskin dengan pengeluaran kurang dari 480 kilogram beras per orang per tahun;
2. hampir cukup dengan pengeluaran antara 480-720 kilogram per orang per tahun; dan
3. tidak miskin dengan pengeluaran lebih dari 720 kilogram per orang per tahun.

Di samping kemiskinan sebagai variabel pokok, penelitian ini juga akan melihat berbagai variabel yang terkait erat baik dengan kemiskinan. Variabel-variabel tersebut adalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, lingkungan, dan lainnya. Dengan melihat keterkaitan variabel-variabel tersebut diharapkan didapatkan profil rumah tangga dan penduduk miskin di DIY.

Analisis data kuantitatif diharapkan bisa menampilkan berbagai tabel silang yang bisa menerangkan keterkaitan variabel-variabel tersebut dengan kemiskinan. Akhirnya, dengan adanya data yang komprehensif itu akan bisa diformulasikan implikasi kebijakan yang pas dalam usaha pengentasan kemiskinan.

Rumah Tangga dan Penduduk Miskin

Perhitungan kemiskinan pada dasarnya adalah perhitungan rumah tangga miskin. Hal ini dikarenakan unit analisis untuk mengukurnya berdasarkan pada keadaan rumah tangga. Seperti

disebutkan pada bagian metode, kemiskinan diukur berdasarkan pengeluaran rumah tangga dibagi jumlah anggota rumah tangga lalu dibandingkan dengan standar kecukupan atau sering juga disebut garis kemiskinan. Oleh karena itu, angka kemiskinan yang pertama didapat adalah kemiskinan rumah tangga. Dalam suatu rumah tangga yang tergolong miskin akan ditemui anggota keluarga yang semuanya tergolong miskin. Anggota keluarga sebagai individu itulah yang kemudian disebut penduduk miskin.

Tabel 1 berisi data rumah tangga dan penduduk miskin di DIY. Dari sampel yang diperoleh berdasarkan Susenas 1992 didapatkan 4,3 persen rumah tangga desa dan 0,3 persen rumah tangga kota di DIY tergolong miskin. Bila dihitung proporsi penduduknya diperoleh angka 5,6 persen untuk pedesaan dan 0,6 persen untuk perkotaan. Keduanya menunjukkan secara jelas bahwa kemiskinan lebih banyak terdapat di pedesaan daripada di

perkotaan. Bila kelompok yang berisiko menjadi miskin (hampir cukup) juga diperhatikan tampak juga bahwa di pedesaan lebih besar proporsinya. Sebagai akibat dari keadaan itu maka kelompok penduduk dan rumah tangga yang berkecukupan menjadi lebih besar proporsinya di perkotaan. Proporsi kelompok yang berkecukupan itu masih lebih besar, sekitar dua kali lipat, dibanding kelompok miskin dan kelompok hampir cukup.

Jumlah Anggota Rumah Tangga

Seperti dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa kemiskinan dihitung berdasar pengeluaran dan jumlah anggota rumah tangga. Konsekuensinya, makin besar jumlah anggota rumah tangga akan makin besar pula risiko untuk menjadi miskin bila pendapatannya tidak meningkat. Hal ini terbukti dalam analisis. Tabel 2 memperlihatkan bahwa rumah tangga miskin memang memiliki jumlah anggota yang lebih banyak. Dari tabel tersebut bahkan bisa disimpulkan bahwa status

Tabel 1
Rumah Tangga dan Penduduk Miskin di DIY

Wilayah	Miskin	Hampir Cukup	Kecukupan	Total
Rumah Tangga				
Pedesaan N	55	301	924	1.280
%	4,3	23,5	72,2	100,0
Perkotaan N	3	95	926	1.024
%	0,3	9,3	90,4	100,0
Penduduk				
Pedesaan N	275	1.387	3.278	4.940
%	5,6	28,1	66,3	100,0
Perkotaan N	21	484	3.287	3.792
%	0,6	12,8	86,6	100,0

Sumber: Hasil Analisis Susenas 1992

Tabel 2
Rata-Rata dan Median Jumlah Anggota Rumah Tangga

Wilayah	Miskin	Hampir Cukup	Kecukupan
Pedesaan Rata-rata	5,00	4,61	3,55
Median	5,00	5,00	3,00
Perkotaan Rata-rata	5,15	4,57	3,50
Median	5,00	4,00	3,00

Sumber: Hasil Analisis Susenas 1992

ekonomi rumah tangga berbanding terbalik dengan jumlah anggota rumah tangga. Dengan kata lain, makin buruk status rumah tangga, makin banyak anggotanya.

Kecenderungan tersebut terjadi di desa maupun di kota, tetapi ada sedikit perbedaan jumlah anggota rumah tangga pada masing-masing kelompok rumah tangga. Rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin dan hampir kecukupan sedikit lebih besar di kota, tetapi jumlah anggota rumah tangga pada kelompok yang berkecukupan sedikit lebih besar di desa. Perbedaan ini secara statistik tampaknya tidak signifikan.

Pendidikan

Status pendidikan kepala rumah tangga di kota tampaknya lebih baik dibanding di desa. Hal ini diuktikan dengan data seperti yang tercantum pada Tabel 3 dan Tabel 4. Baik pendidikan formal maupun kemampuan berbahasa dan menulis kepala rumah tangga di kota lebih baik dibanding di desa. Meskipun demikian, kaitan antara kemiskinan dan status pendidikan tidak begitu jelas untuk rumah tangga pedesaan. Sebaliknya, di kota rumah tangga yang status ekonominya lebih buruk dikepalai oleh orang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Tampak dengan jelas pada tabel bahwa kepala rumah tangga yang miskin di perkotaan

Tabel 3
Status Pendidikan Kepala Rumah Tangga

Wilayah	Bersekolah	Miskin	Hampir Cukup	Kecukupan
Pedesaan	Tidak Pernah	32,7	36,2	35,2
	Pernah	67,3	63,8	64,8
	Total	100,0	100,0	100,0
Perkotaan	Tidak Pernah	29,6	24,1	12,0
	Pernah	70,4	75,9	88,0
	Total	100,0	100,0	100,0

Sumber: Hasil Analisis Susenas 1992

Tabel 4
 Persentase Kepala Rumah Tangga yang Tidak Bisa Bahasa Indonesia dan Menulis

Wilayah	Tidak bisa	Miskin	Hampir Cukup	Kecukupan
Pedesaan	Bahasa Indonesia	32,7	34,9	35,7
	Menulis	32,7	37,5	36,4
Perkotaan	Bahasa Indonesia	25,5	21,5	9,3
	Menulis	27,6	25,4	12,7

Sumber: Hasil Analisis Susenas 1992

lebih banyak yang tidak pernah bersekolah, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis.

Kegiatan dan Produktivitas

Ada beberapa indikator yang bisa dijadikan tolok ukur produktivitas kegiatan, antara lain adalah status kerja, jenis pekerjaan, jumlah hari kerja, dan jam kerja. Indikator-indikator tersebut akan dicoba dianalisis dalam kajian ini.

Cukup banyak proporsi kepala rumah tangga miskin yang tidak produktif, namun mereka juga ditemukan pada kelompok rumah tangga yang tidak miskin. Di kota bahkan

hanya 56 persen kepala rumah tangga berkecukupan yang bekerja seminggu lalu. Mengingat keadaan yang demikian itu maka akan dicoba untuk melihat indikator lain.

Beberapa indikator yang dicoba dikaji ternyata tidak semua menunjukkan adanya kaitan yang jelas antara kegiatan kepala rumah tangga dengan kemiskinan. Variabel jenis lapangan usaha utama yang dikategorikan menjadi pertanian dan nonpertanian berasosiasi dengan kemiskinan. Dalam hal ini kemiskinan dieirikan oleh lapangan usaha bidang pertanian,

Tabel 5
 Persentase Kegiatan KK Terbanyak Seminggu yang Lalu

Wilayah	Kegiatan	Miskin	Hampir Cukup	Kecukupan
Pedesaan	Bekerja	85,5	91,4	86,4
	Urus RT	1,8	2,3	7,6
	Lainnya	12,7	6,3	6,0
	Total	100,0	100,0	100,0
Perkotaan	Bekerja	89,8	84,5	56,0
	Urus RT	4,1	9,6	35,0
	Lainnya	6,1	5,9	9,0
	Total	100,0	100,0	100,0

Sumber: Hasil Analisis Susenas 1992

inipun masih ada pengecualian pada rumah tangga miskin di desa. Variabel lain yang bisa menerangkan kemiskinan dengan pekerjaan adalah jumlah pekerja dalam rumah tangga dan jumlah jam kerja total dari anggota rumah tangga

yang bekerja tersebut. Bila jam kerja total seluruh anggota rumah tangga dibagi jumlah yang bekerja pada rumah tangga tersebut maka tampak jelas (Tabel 8) bahwa rumah tangga miskin di pedesaan maupun di perkotaan relatif

Tabel 6
Persentase KK yang Sedang Mencari Pekerjaan

Wilayah		Miskin	Hampir Cukup	Kecukupan
Pedesaan	ya	0,0	2,7	4,5
	tidak	100,0	97,3	95,5
	Total	100,0	100,0	100,0
Perkotaan	ya	3,1	3,6	3,4
	tidak	96,9	96,4	96,6
	Total	100,0	100,0	100,0

Sumber: Hasil Analisis Susenas 1992

Tabel 7
Status Pekerjaan Utama KK Seminggu yang Lalu

Wilayah	Perkerjaan	Miskin	Hampir Cukup	Kecukupan
Pedesaan	Tidak bekerja	10,9	5,3	6,7
	Usaha sendiri	3,6	8,3	12,4
	Buruh tidak tetap	60,0	69,8	55,6
	Buruh tetap	0,0	0,3	0,9
	Brh/kary pemb.	1,8	1,3	9,6
	Brh/kary swasta	18,2	14,3	14,0
	Pekerja keluarga	5,5	0,7	0,8
	Total	100,0	100,0	100,0
Perkotaan	Tidak bekerja	4,1	9,2	38,0
	Usaha sendiri	18,4	16,2	12,2
	Buruh tidak tetap	37,8	32,7	15,4
	Buruh tetap	0,0	0,7	2,1
	Brh/kary pemb.	3,1	4,6	13,3
	Brh/kary swasta	34,7	34,3	18,3
	Pekerja keluarga	2,0	2,3	0,6
	Total	100,0	100,0	100,0

Sumber: Hasil Analisis Susenas 1992

Tabel 8
Rata-Rata Jumlah Pekerja dan Jum Kerja

Wilayah		Miskin	Hampir Cukup	Kecukupan
Pedesaan	Jam kerja	94,44	98,83	83,31
	Jumlah pekerja	2,38	2,24	1,92
	Rata-rata jam kerja/pekerja	33	34	35
Perkotaan	Jam kerja	91,43	90,88	60,15
	Jumlah pekerja	2,14	1,84	1,19
	Rata-rata jam kerja/pekerja	43	49	50

Sumber: Hasil Analisis Susenas 1992

Tabel 9
Lapangan Usaha Utama KK Seminggu yang Lalu

Wilayah	Jenis Usaha	Miskin	Hampir Cukup	Kecukupan
Pedesaan	Tani	63,6	75,1	58,1
	Non Tani	39,4	24,9	41,9
	Total	100,0	100,0	100,0
Perkotaan	Tani	49,0	30,7	11,1
	Non Tani	51,0	69,3	99,9
	Total	100,0	100,0	100,0

Sumber: Hasil Analisis Susenas 1992

kurang produktif dibandingkan dengan rumah tangga dengan status ekonomi yang lebih baik. Dalam tabel tersebut rata-rata jam kerja per orang meningkat sesuai dengan peningkatan status ekonomi. Di pedesaan rata-rata jam kerja adalah 33, 34, dan 35 untuk rumah tangga miskin, hampir cukup, dan rumah tangga berkecukupan secara berurutan. Bila dibandingkan dengan rumah tangga di perkotaan, rata-rata jam kerja per orang tersebut masih lebih rendah. Di perkotaan rata-rata jam kerja per orang pada rumah tangga miskin, hampir cukup, dan kecukupan secara berurutan adalah 43, 49, dan 50.

Pengeluaran

Pengeluaran rumah tangga di desa dan kota tampak berbeda dengan jumlah pengeluaran yang lebih tinggi ditemukan di perkotaan. Hal ini terjadi untuk pengeluaran makanan dan bukan makanan. Pengeluaran yang berbeda secara mencolok antara desa dan kota antara lain ditemukan untuk protein. Konsumsi protein di kota kelihatan jauh lebih tinggi dibanding di desa. Hal serupa juga ditemukan pada pengeluaran konsumsi lain-lain. Data yang ini barangkali bisa diinterpretasi bahwa rumah tangga kota lebih banyak variasi dalam mengonsumsi makanan.

Sementara itu, pengeluaran bukan makanan juga ada perbedaan pola antara desa dan kota. Rumah tangga desa memhelanjakan uang cukup banyak untuk kesehatan, sementara di kota pengeluaran yang menonjol adalah untuk pendidikan. Di pedesaan pengeluaran untuk semua jenis makanan meningkat sesuai dengan peningkatan status ekonomi. Sementara itu, di perkotaan hubungan tersebut hanya dijumpai pada pengeluaran makanan kelompok lainnya. Gejala yang terjadi di kota ini barangkali muncul karena sebagian besar rumah tangga perkotaan telah mampu memenuhi kebutuhan pangan. Sementara itu, secara metodologis tidak teraturnya angka tersebut bisa dipengaruhi oleh jumlah rumah tangga pada setiap kelompok. Seperti diketahui pada bagian terdahulu, rumah tangga miskin

di kota jumlahnya sangat sedikit sehingga angka rata-rata kelompok ini seperti yang tercantum pada tabel mengandung simpang baku yang lebih besar dibanding kelompok lain.

Untuk pengeluaran bukan makanan ada beberapa jenis pengeluaran yang meningkat sesuai dengan status ekonomi rumah tangga. Pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pajak meningkat sejalan dengan status ekonomi rumah tangga, sementara jenis-jenis pengeluaran lain tidak demikian. Apabila jumlah anggota rumah tangga keseluruhan dan jumlah anggota rumah tangga yang bersekolah tidak berbeda secara mencolok, maka pengeluaran pendidikan seperti yang digambarkan di atas dapat menyiratkan arti bahwa tingkat dan kualitas pendidikan anggota yang bersekolah pada rumah tangga kaya lebih baik

Tabel 10
Pengeluaran Konsumsi

Wilayah	Jenis	Miskin		Hampir Cukup		Kecukupan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pedesaan	Karbohidrat	4469	43,3	5268	38,4	4771	27,8
	Protein	1579	15,3	2227	16,2	3511	20,5
	Buah-Sayur	1205	11,7	1629	11,9	1978	11,5
	Minum	1941	18,8	2773	20,2	3500	20,4
	Lainnya	1112	10,8	1827	13,3	3388	19,8
	Total	10307	100,0	13725	100,0	17148	100,0
Perkotaan	Karbohidrat	5715	36,9	6043	33,0	3644	16,6
	Protein	5716	36,9	3164	17,3	4619	21,1
	Buah-Sayur	1774	11,4	2383	13,0	2380	10,9
	Minum	2917	18,8	3210	17,5	3056	14,0
	Lainnya	2880	18,6	3510	19,2	8228	37,5
	Total	15497	100,0	18309	100,0	21928	100,0

Sumber: Hasil Analisis Susenas 1992

Tabel 11
Pengeluaran Non Pangan

Wilayah	Jemis	Miskin		Hampir Cukup		Kecukupan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pedesaan	Barang & Jasa	1807	6,8	1782	5,9	4691	7,3
	Pendidikan	3407	12,9	4564	15,1	8442	13,1
	Kesehatan	3023	11,4	3807	12,6	8976	14,0
	Pakaian	4279	16,2	3876	12,8	6150	9,6
	Barang tahan lama	2208	8,3	1188	3,9	8746	13,6
	Pajak	201	0,8	345	1,1	1223	2,0
	Kegiatan sosial	2482	9,4	2665	8,8	6463	10,0
	Bahan bakar	9071	34,3	12025	39,7	19562	30,4
	Total	26478	100,0	30252	100,0	64253	100,0
Perkotaan	Barang & Jasa	1521	5,0	2707	6,3	8583	7,4
	Pendidikan	5421	17,5	10191	23,6	43370	37,4
	Kesehatan	2337	7,5	3663	8,5	8622	7,4
	Pakaian	2808	9,1	4744	11,0	7827	6,7
	Barang tahan lama	560	1,8	1616	3,7	2580	2,2
	Pajak	258	0,8	376	0,9	1945	1,7
	Kegiatan sosial	5582	18,0	2159	5,0	6959	6,0
	Bahan bakar	12496	40,3	17642	41,0	36146	31,2
	Total	30983	100,0	43098	100,0	116032	100,0

Sumber: Hasil Analisis Susenas 1992

sehingga biaya yang dibutuhkan juga lebih besar.

Di perkotaan pengeluaran terbesar pada umumnya untuk pendidikan, sedangkan di pedesaan proporsi pengeluaran untuk pendidikan menduduki tempat paling tinggi hanya pada kelompok rumah tangga yang hampir berkecukupan. Data ini menyiratkan bahwa pendidikan tampaknya menjadi ekonomi yang cukup berat, sementara itu persepsi bahwa pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan juga masih

terus dianut. Proporsi pengeluaran yang cukup besar juga terdapat pada kegiatan sosial. Besarnya pengeluaran ini di kelompok rumah tangga miskin di perkotaan cukup ironis sebab di tengah usaha untuk keluar dari kemiskinan mereka dibebani oleh biaya yang besar untuk kegiatan sosial.

Kondisi Rumah

Luas lantai rumah di pedesaan pada umumnya lebih luas dibanding di perkotaan. Hal ini mudah dipahami karena ketersediaan lahan untuk tinggal

di pedesaan masih lebih baik dibanding di perkotaan. Akan tetapi, bila diperhatikan jenis lantainya akan tampak bahwa rumah di perkotaan lebih baik.

Baik di pedesaan maupun di perkotaan luas lantai dan jenis lantai berkorelasi dengan status ekonomi rumah tangga. Rumah tangga miskin memiliki rumah dengan luas lantai yang lebih sempit dan kualitas lantai yang lebih jelek dibanding rumah yang

dimiliki orang atau keluarga kaya. Bila luas lantai dan jenis lantai dibandingkan, maka terlihat bahwa jenis lantai memheri informasi tentang status rumah tangga yang lebih menonjol dibanding luas lantai. Hal ini terlihat dari perbedaan angka antara kelompok rumah tangga yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, barangkali bisa diusulkan di sini untuk mengkaji kemiskinan bisa diambil salah satu variabel saja dalam melihat karakteristik

Tabel 12
Lantai dan Dinding Rumah

Wilayah		Miskin	Hampir Cukup	Tidak
Luas Lantai Rumah (M²)				
Pedesaan	Rata-rata	99,1	113,0	126,2
Perkotaan	Rata-rata	68,8	78,3	83,1
Persentase Jenis Lantai				
Pedesaan	"Keras"	9,1	24,6	43,7
	"Lunak"	90,9	75,4	56,3
	Total	100,0	100,0	100,0
Perkotaan	"Keras"	58,2	77,5	93,9
	"Lunak"	41,8	22,4	6,1
	Total	100,0	100,0	100,0
Persentase Jenis Dinding Rumah				
Pedesaan	Tembok	20,0	25,9	47,2
	Kayu	18,2	17,3	14,6
	Lainnya	61,8	56,8	38,2
	Total	100,0	100,0	100,0
Perkotaan	Tembok	64,3	76,9	88,8
	Kayu	4,1	3,6	4,0
	Lainnya	31,6	19,5	7,3
	Total	100,0	100,0	100,0

Sumber: Hasil Analisis Susenas 1992

- * "Keras": marmer, keramik, ubin, tegel, semen, bata, kayu
- "Lunak": bambu, tanah, lainnya.

Tabel 13
Penerangan dan Air Minum

Wilayah	Jenis	Miskin	Hampir Cukup	Kecukupan
Persentase Jenis Penerangan Rumah Tangga				
Pedesaan	Listrik	10,9	18,9	40,4
	Non Listrik	89,1	81,1	59,6
	Total	100,0	100,0	100,0
Perkotaan	Listrik	48,0	70,3	92,5
	Non Listrik	52,0	29,7	7,6
	Total	100,0	100,0	100,0
Persentase Jenis Sumber Air Minum Rumah Tangga				
Pedesaan	Leding/pompa	0,0	2,7	4,8
	Sumur	67,3	63,8	69,0
	Lainnya	32,7	33,5	26,2
	Total	100,0	100,0	100,0
Perkotaan	Leding/pompa	2,0	5,6	92,4
	Sumur	95,9	93,8	1,0
	Lainnya	2,1	0,6	6,6
	Total	100,0	100,0	100,0

Sumber: Hasil Analisis Susenas 1992

rumah tangga miskin, yaitu variabel jenis lantai.

Secara fisik kondisi rumah tangga miskin tampaknya tidak sulit dilihat. Pernyataan ini didukung oleh hasil analisis tentang jenis dinding rumah. Baik di desa maupun di kota rumah tangga miskin lebih sedikit yang memiliki rumah dengan dinding permanen (tembok). Di desa rumah kayu juga lebih banyak dimiliki oleh rumah tangga miskin, sedangkan di kota tidak ada hubungan yang jelas antara status ekonomi rumah tangga dengan jenis rumah kayu. Secara keseluruhan bisa disimpulkan bahwa rumah tangga miskin sebagian besar tinggal di rumah dengan dinding yang tidak permanen

sedangkan rumah tangga berkecukupan sebagian besar rumahnya ber dinding tembok.

Seiring dengan kondisi dinding rumah, kondisi dinding lantai juga mencerminkan status ekonomi rumah tangga. Baik di desa maupun di kota makin buruk status ekonomi suatu rumah tangga makin banyak proporsinya yang lantai rumahnya tidak keras. Jenis lantai rumah tangga ternyata berbeda cukup mencolok antara desa dengan kota. Sebagian besar rumah tangga desa lantai rumahnya tidak keras, sementara sebagian besar rumah tangga kota memiliki lantai rumah yang tergolong keras.

Listrik sebagai sumber penerangan rumah tangga maupun kebutuhan yang lain sejauh ini lebih banyak digunakan di perkotaan. Hal ini tampaknya disebabkan oleh program listrik masuk desa yang belum merata. Oleh karena itu, pembahasan tentang pemanfaatan listrik di desa dan kota tidak dibandingkan secara absolut, tetapi lebih banyak ditekankan pada perbandingan antarkelompok rumah tangga.

Baik di desa maupun di kota ada hubungan yang positif antara pemakaian listrik dengan status ekonomi rumah tangga. Semakin baik status ekonomi rumah tangga, semakin tinggi persentase yang menggunakan listrik untuk penerangan rumah. Seperti telah disebutkan di atas bahwa penggunaan listrik di desa banyak dipengaruhi oleh pengadaan listrik itu sendiri, oleh karena itu, tidak mengherankan bila kelompok yang tidak miskinpun sebagian besar tidak menggunakan listrik untuk penerangan. Sebaliknya, di perkotaan DIY tampaknya telah terjangkau jaringan listrik semua, namun masih cukup banyak yang tidak menggunakannya. Hal ini juga berlaku bagi kelompok yang tergolong tidak miskin. Sekitar 7,5 persen dari rumah tangga berkecukupan ternyata masih belum menggunakan listrik sebagai sumber energi rumah tangga mereka.

Terlalu sedikit persentase rumah tangga di desa yang menggunakan air leding dalam penelitian ini, sehingga sulit untuk mengaitkan penggunaan air minum dengan kemiskinan. Berbeda dengan di desa, di kota penggunaan air minum tampak terkait dengan kemiskinan. Hanya 2 persen rumah tangga miskin yang menggunakan air leding untuk minum, sementara rumah tangga yang hampir kecukupan persentasenya 5,6 persen. Data ini mengarah pada kesimpulan bahwa rumah tangga miskin tidak mampu membeli air minum yang sehat mereka lebih mengutamakan sumber air yang lebih murah seperti sumur.

Kesehatan

Di desa maupun di kota kelompok yang hampir kecukupan memiliki persentase kesakitan yang paling rendah dibanding kelompok rumah tangga lainnya. Di desa justru rumah tangga tidak miskin yang paling banyak merasakan adanya keluhan sakit. Fenomena ini barangkali disebabkan dua hal. Pertama, persepsi tentang sakit mungkin berbeda dan orang kaya lebih banyak memiliki pengetahuan tentang sakit sehingga mampu mengidentifikasinya. Kedua, rumah tangga miskin tidak peduli dengan masalah kesehatan. Mereka lebih banyak memperhatikan faktor lain dibanding kesehatannya, bahkan bisa,

Tabel 14
Persentase yang Sakit

Wilayah	Miskin	Hampir Cukup	Kecukupan
Pedesaan	30,9	25,2	34,6
Perkotaan	29,6	24,8	29,5

Sumber: Hasil Analisis Susenas 1992

Tabel 15
 Persentase Sumber Informasi yang Digunakan KK

Wilayah	Sumber	Miskin	Hampir Cukup	Kecukupan
Pedesaan	Radio	56,4	66,4	66,1
	TV	34,5	48,8	58,5
	Cetak	1,8	3,0	18,8
Perkotaan	Radio	71,4	75,2	85,2
	TV	66,3	76,9	89,7
	Cetak	12,2	22,8	65,3

Sumber: Hasil Analisis Susenas 1992

karena terbiasa, rasa sakit yang tidak menonjol tidak lagi dinilai sebagai sakit yang benar-benar sakit.

Akses Informasi

Akses terhadap informasi ternyata memiliki pola yang sangat teratur sesuai tingkat kemiskinan. Makin miskin suatu rumah tangga, makin kecil akses terhadap informasinya. Hal ini ditemukan di pedesaan maupun di perkotaan untuk semua jenis informasi (audio, visual, dan cetak). Perbedaan yang menonjol ditemukan antara pedesaan dengan perkotaan di mana rumah tangga kota lebih banyak memiliki akses informasi. Sumber informasi yang paling banyak digunakan adalah radio disusul televisi, dan media cetak. Di perkotaan televisi tampaknya mengimbangi radio sebagai sumber informasi dan hiburan.

Kesimpulan

Dari data-data yang telah ditampilkan pada uraian sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa kemiskinan berasosiasi dengan berbagai hal yang kurang menguntungkan. Kajian ini membatasi kemiskinan pada aspek ekonomi dengan menggunakan

pengeluaran sebagai proksi untuk menentukan kelompok rumah tangga miskin. Sementara itu, sudah diketahui bersama bahwa kemiskinan memiliki dimensi yang banyak. Melihat asosiasi-asosiasi seperti yang telah ditampilkan di atas tampaknya kemiskinan ekonomi berkaitan dengan kemiskinan lain seperti pendidikan, perumahan, dan informasi.

Kemiskinan ekonomi tampaknya berawal dari pendapatan yang rendah. Rendahnya pendapatan tampaknya berkaitan dengan usaha yang kurang produktif seperti buruh dan di sektor pertanian di Jawa atau DIY pada khususnya. Mereka masuk ke dalam sektor yang kurang produktif karena kualitas mereka juga kurang memadai seperti yang dicerminkan dengan pendidikan yang rendah. Pendapatan yang rendah ini akan lebih kecil lagi porsinya bila dibagi anggota rumah tangga yang banyak yang pada umumnya juga tidak produktif. Dengan pendapatan per kapita yang rendah ini maka pengeluaran untuk berbagai kebutuhan juga kecil jumlahnya. Akibatnya, kemampuan mereka untuk memelihara lingkungan rumah tangga

serta memenuhi kebutuhan lain seperti informasi dan pendidikan anak juga kurang baik. Akibatnya, keadaan lingkungan, akses informasi, dan lainnya juga tidak baik. Bila digambarkan keterkaitan-keterkaitan tersebut bisa diringkas seperti dalam Skema 1.

Implikasi

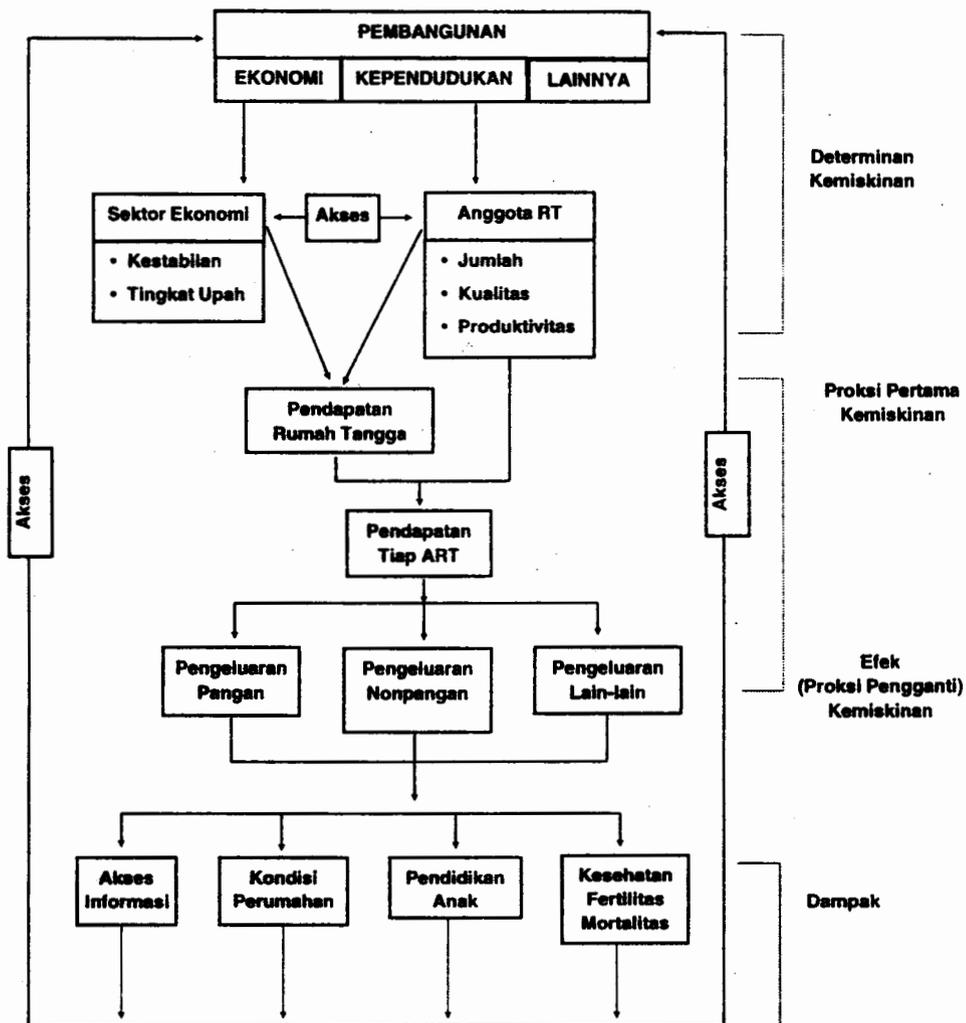
Beberapa ahli dan pengamat masalah kemiskinan (misalnya Scott, 1981; Widiyanto, 1993) mengatakan bahwa kemiskinan tidak selalu perlu diteliti dan diukur, tetapi lebih penting untuk dicegah atau dihilangkan. Pendapat seperti itu ada benarnya dari beberapa segi. Pertama, bila penduduk atau rumah tangga miskin memang sudah diketahui secara jelas, maka langkah mengatasinya secara kongkret memang lebih penting daripada usaha-usaha yang diarahkan pada pemahaman masalah kemiskinan. Kedua, sejauh ini terlalu banyak pembahasan dan penelitian tentang kemiskinan, tetapi terlalu sedikit usaha untuk mencegah dan mengentaskannya. Oleh karena itu, langkah nyata dalam berbagai program dinilai lebih penting.

Penelitian barangkali bisa menjadi salah satu acuan untuk menentukan langkah pengentasan kemiskinan. Berdasar pada asumsi dan kesimpulan seperti disebutkan di atas, maka ada dua hal pokok yang perlu digarap sekaligus untuk menghapus kemiskinan. Pertama, rumah tangga miskin dikepalai oleh kepala rumah tangga yang secara ekonomi kurang produktif. Agar pendapatan mereka meningkat, mereka harus menjadi lebih produktif. Akan tetapi, usaha ini akan terbentur oleh beberapa masalah. Di antaranya adalah kualitas sumber daya manusia yang

rendah dan sempitnya kesempatan untuk menjangkau sektor ekonomi yang produktif. Karena sumber daya manusia yang terjun dalam dunia kerja relatif sulit ditingkatkan, jalan yang lebih besar kemungkinan berhasilnya adalah membuka akses bagi mereka untuk menjangkau sektor-sektor produktif. Keterlibatan mereka di sektor ini diperkirakan juga akan meningkatkan kualitas sumber daya (*learning by experince*).

Kedua, beban rumah tangga miskin ternyata lebih berat karena di dalamnya terdapat anggota yang lebih banyak dan kurang produktif. Melihat fakta ini tampaknya perlu untuk menyarankan pengendalian kelahiran, terutama pada rumah tangga miskin yang memiliki anak banyak. Dengan beban yang lebih besar ini maka usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di rumah tangga miskin akan sulit berkembang. Padahal meningkatnya sumber daya manusia anggota rumah tangga miskin merupakan suatu proses yang dalam waktu relatif lama diyakini akan mengentaskan kemiskinan.

Akhirnya, optimisme untuk mengentaskan kemiskinan tidak bisa berhenti. Kemiskinan memang merupakan akibat dari berbagai hal, namun kemiskinan juga harus dilihat dari sisi proses. Bila memandang rumah tangga miskin sebagai suatu akibat semata-mata, ada kemungkinan akan muncul sikap fatalis yang mencerminkan pesimisme dalam menanggulangi kemiskinan. Sebaliknya, dengan memandang kemiskinan sebagai suatu proses yang akan cepat berjalan dengan menyingkirkan sebab-sebabnya maka usaha untuk mengentaskan kemiskinan akan terasa lebih berarti.



Skema 1
Kerangka Konseptual Analisis Kemiskinan dan Kependudukan

DAFTAR PUSTAKA

- Adler-Karlsson, G. 1981. "Aspek-aspek kemiskinan di negara sedang berkembang", dalam Ala, A.B. ed., *Kemiskinan dan strategi memerangi kemiskinan*. Yogyakarta: Liberty. Hlm.: 57-88.
- Indonesia. Biro Pusat Statistik. 1987. *Indikator pemerataan pendapatan: jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia, 1976-1984*. Jakarta.
- 1991. *Kemiskinan dan pemerataan pendapatan di Indonesia 1976-1990*. Jakarta.
- 1993. *Indikator kesejahteraan rakyat 1992*. Jakarta.
- Cheetham, R.J. and Peters, R.K. 1991. "Poverty reduction during the new order government", paper dipresentasikan pada *The Colloquium on Poverty and Development in Indonesia*, Hague, Netherlands, April 9-10.
- Chernichovsky, D. dan Meesook, O. 1984. *Poverty in Indonesia: a profile*. Washington, D.C. World Bank. World Bank Staff Working Paper No. 671.
- Dillon, H.S. dan Hermanto. 1993. "Kemiskinan di negara berkembang: masalah konseptual global", *Prisma*, 3: 11-22.
- Gunawan, M. dan Erwidodo. 1993. "Urbanisasi dan pengurangan kemiskinan: kasus migrasi desa-kota di Jawa Barat", *Prisma*, 3: 44-56.
- Hadiwigeno, S. dan Pakpahan, A. 1993. "Identifikasi wilayah miskin di Indonesia", *Prisma*, 3: 23-32.
- Panbiru, M. dan Saliem, H.P. 1993. "Kecukupan dan ketahanan pangan", *Prisma*, 3: 33-43.
- Sajogyo. 1977. "Golongan miskin dan partisipasi dalam pembangunan desa", *Prisma*, 3: 10-17.
- 1978. "Lapisan masyarakat yang paling lemah di Pedesaan Jawa", *Prisma*, 3: 3-14.
- 1986. "Beragam penjelasan hal kemiskinan", *Prisma*, 10: 51-57.
- 1993. "Pemikiran tentang kemiskinan di Indonesia: dari masa penjajahan sampai masa pembangunan", *Prisma*, 3: 3-10.
- Scott, W. 1981. *Concept and measurement of poverty*. Geneva: UNSRID.
- Singarimbun, M. dan Penny, D.H. 1976. *Penduduk dan kemiskinan: kasus di pedesaan Jawa*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Suryana, A. dan Pasandaran, E. 1993. "Pembangunan pertanian berwawasan lingkungan: penanggulangan petani miskin dan kemiskinan", *Prisma*, 12(3): 57-67.
- Widiyanto, P. 1993. "Suara Si Miskin", *Prisma*, 12(3): 3.
- World Bank. 1990. *Indonesia: strategy for a sustained reduction in poverty*. A World Bank Country Study. Washington: The World Bank.

